

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan politik merupakan salah satu upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di era zaman demokrasi seperti ini. Dalam sebuah negara demokrasi, tercakup hak-hak seperti hak kemerdekaan pers, hak menyatakan pendapat, hak beragama, hak berorganisasi. Di negara demokrasi ada kebebasan yang sama bagi setiap warganegara, serta adanya pengakuan terhadap nilai-nilai dan martabat individu selaku pribadi. Oleh karena itu pendidikan harus diupayakan untuk, mendidik manusia dan anak manusia supaya bisa berkembang dan bebas maksimal.² Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dan memahami apa hak dan kewajiban mereka sebagai warganegara. Mereka hanya hidup berdsarkan kepentingan mereka masing-masing dan tanpa peduli dengan hak dan kewajiban mereka.

Padahal jika mereka menggunakan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam partisipasi politik, mereka dapat turut serta merubah pola pemeritahan yang ada pada negara yang dapat mempengaruhi hidup mereka. Minimnya pendidikan politik menjadikan minimnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi pada agenda-agenda pemerintahan. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap partisipasi kebijakan publik

² Rudi Hartono, *Fungsi Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Bermasyarakat*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2021) hlm. 3

menjadikan peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik dipertanyakan. Pendidikan politik merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh para lembaga formal maupun lembaga informal dengan tujuan untuk membentuk kepribadian politik setiap warga negara agar memiliki kesadaran dalam menumbuhkan kemampuannya dalam berpartisipasi dalam politik.³ Mengingat pentingnya pendidikan politik terhadap masyarakat, maka organisasi yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran politik terhadap masyarakat adalah partai politik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Secara umum tujuan diadakannya partai politik dijelaskan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa tujuan umum partai politik yaitu mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

³ Eko Handoyo & Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017) hlm. 11

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵

Pada negara-negara berkembang, sebagai sarana pendidikan politik terhadap masyarakat, partai politik dapat meningkatkan kesadaran politik melalui berbagai cara seperti pengajaran politik yang benar. Cara ini bisa dilakukan sebuah partai dengan berbagai cara seperti pelaksanaan muktamar maupun program-program pelatihan politik, pengajaran sejarah nasional serta publikasi program dan pandangan politik di berbagai jurnal dan buletin pengajaran politik yang benar, cara ini bisa dilakukan sebuah partai dengan berbagai cara seperti pelaksanaan muktamar maupun program-program pelatihan politik, pengajaran sejarah nasional serta publikasi program dan pandangan politik di berbagai jurnal dan buletin. Kehidupan partai termasuk media penyiapan bagi individu untuk berani mengambil keputusan dan berpikir independen mengenai berbagai masalah umum, serta kemampuan untuk bersikap kritis, dan menentukan pilihan.⁶

Apabila pendidikan politik dilakukan secara maksimal oleh partai politik kepada masyarakat, maka tingkat kesadaran masyarakat terhadap partisipasi pengambilan kebijakan publik akan meningkat pula sehingga dengan tingginya partisipasi masyarakat terhadap pengambilan kebijakan

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

⁶ Muhammad Daffa Daud, *Partai Politik Dan Pendidikan Politik (Studi Atas Program Pendidikan Politik Partai Golongan Karya Kota Tangerang Selatan*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019) hlm.16-17

publik akan berdampak kepada terciptanya produk kebijakan publik yang berkualitas. Dengan adanya produk kebijakan publik yang berkualitas, maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia yang berkualitas pula. Salah satu Kabupaten di Indonesia yang kurang dirasakan kehadiran partai politik dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat yaitu di Kabupaten Tulungagung.

Perlunya peningkatan terhadap partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tulungagung juga diperkuat dengan rendahnya tingkat rasionalitas politik masyarakat Kabupaten Tulungagung. Hal tersebut dibuktikan dengan pada tahun 2018 berdasarkan penghitungan cepat oleh tim sukses calon dan penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung melalui aplikasi android, pasangan petahana Syahri Mulyo (yang mana pada saat itu berstatus sebagai tersangka)-Maryoto Bhirowo mengumpulkan 59,8 persen suara. Sedang pasangan Margiono-Eko Prisdianto hanya mengumpulkan 40,2 persen. Hal tersebut mendapatkan respon dari dosen Ilmu Pemerintahan dan Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya Malang M Lukman Hakim yang mengatakan, rasionalitas atau kesadaran politik masyarakat dalam memilih calon di Tulungagung masih rendah.⁷

Rendahnya rasionalitas masyarakat Kabupaten Tulungagung dalam melakukan pemilihan baik pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden dan

⁷ <https://www.kompas.id/baca/utama/2018/06/29/rendahnya-rasionalitas-politik-ditulangagung-membuat-tersangka-korupsi-terpilih-lagi> diakses pada 01 April 2023 pukul 04.00 WIB

wakil presiden hingga pemilihan anggota legislatif menjadikan pentingnya upaya untuk melakukan peningkatan kesadaran masyarakat Kabupaten Tulungagung terhadap politik. Upaya untuk meningkatkan kesadaran tersebut merupakan tanggungjawab bersama termasuk tanggungjawab partai politik yang ada di Kabupaten Tulungagung. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Tulungagung terhadap politik, Partai Golongan Karya Kabupaten Tulungagung berupaya melakukan peningkatan kesadaran politik melalui berbagai upaya salah satunya melalui pendidikan politik kepada masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh partai Golongan Karya Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat Kabupaten Tulungagung memiliki dampak yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Tulungagung, partai Golongan Karya memperoleh suara terbanyak yakni sejumlah 145.206 atau 23% dari jumlah suara sah pada pemilu 2024.⁸ Perolehan suara yang besar tidak lepas dari upaya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai Golongan Karya Kabupaten Tulungagung.

Salah satu contoh upaya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai Golongan Karya Kabupaten Tulungagung yakni pendidikan politik yang dilakukan pada tanggal 2 Maret 2022 dengan tema “Pendidikan Politik

⁸ Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Tulungagung

Audit Organisasi DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Tulungagung.⁹ Pendidikan politik tersebut dilakukan demi peningkatan kapasitas kader partai Golongan Karya dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian “Peran Partai Golongan Karya Dalam Membangun Kesadaran Politik Masyarakat Kabupaten Tulungagung Perspektif Teori Sherman Dan Kolker”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran partai Golongan Karya dalam membangun kesadaran politik di masyarakat Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana analisis teori Sherman dan Kolker tentang pendidikan politik yang dilakukan oleh partai Golongan Karya di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana analisis teori Sherman dan Kolker tentang pendidikan politik yang dilakukan oleh partai Golongan Karya di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian tentang Peran Partai Golongan Karya Dalam Membangun Kesadaran Politik Masyarakat Kabupaten Tulungagung Perspektif Teori Sherman Dan Kolker ini diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui peran partai Golongan Karya dalam membangun kesadaran politik pada masyarakat di Kabupaten Tulungagung.

⁹ <https://www.instagram.com/p/CaojJEEvZZk/?igsh=eDFrcm5sZWFxaTJx> diakses 01 April 2023 pukul 05.00 WIB

2. Untuk menganalisis pendidikan politik yang dilakukan oleh partai Golongan Karya di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis teori Sherman dan Kolker tentang pendidikan politik yang dilakukan oleh partai Golongan Karya di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis bagi penulis dan juga bagi pembaca. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis (Keilmuan)
 - a. Membantu dan memberikan sumbangan pemikiran kepada para akademisi dalam upaya pengkajian dan pengembangan pendidikan politik.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dan juga dapat dijadikan tambahan referensi dalam memperluas wawasan yang kaitannya dengan pendidikan politik bagi masyarakat.
2. Kegunaan dari segi praktis
 - a. Bagi Pemerintah

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih keilmuan guna sebagai referensi pemerintah dalam membuat kebijakan terkait pendidikan politik khususnya wilayah

Kabupaten Tulungagung.

b. Bagi Partai Golongan Karya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi partai Golongan Karya dalam melakukan pendidikan politik khususnya di Kabupaten Tulungagung. Selain itu melalui penelitian ini diharapkan mampu mendorong partai Golongan Karya untuk melakukan inovasi strategi dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

c. Bagi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagai bahan evaluasi serta penyusunan program terkait pendidikan politik kepada masyarakat Kabupaten Tulungagung.

d. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat dapat memahami pentingnya pendidikan politik serta kesadaran agar perpolitikan khususnya perpolitikan di Kabupaten Tulungagung semakin baik.

e. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini penulis dapat meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian yang disusun dan untuk menerapkan teori-teori yang telah penulis terima selama mengikuti perkuliahan di

Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sayyid
Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi di atas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat pada judul, dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Pendidikan politik

Mengenai arti pendidikan politik, para tokoh banyak perbedaan dalam mendefinisikan pengertian pendidikan politik itu sendiri. Sherman dan Kolker menjelaskan bahwa pendidikan politik selalu terkait dengan internalisasi nilai, suatu proses dimana individu mempelajari budaya dan menjadi bagian dari budaya tersebut sebagai unsur yang penting dalam konsep dirinya. Sebagai proses pembudayaan, pendidikan politik terkait dengan nilai, kepercayaan, dan pola perilaku yang dipelajari pada usia awal yang membentuk sifat dasar seseorang.¹⁰

Berdasarkan pengertian mengenai pendidikan politik diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pendidikan politik merupakan suatu proses internalisasi nilai kepada individu yang

¹⁰ Edwin Nurdiansyah, Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia, *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, Volume 2, Nomor 1, 2015, hlm.55

dilakukan secara sengaja melalui proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara agar memiliki kesadaran dan partisipasi dalam politik. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik akan menentukan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang berlaku di masyarakat. Misalnya kita memilih seseorang pemimpin, tentunya pemimpin tersebut apabila terpilih dalam pemilihan umum dan berkuasa, dia mempunyai hak untuk menentukan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang ada dalam masyarakat dan mau tidak mau masyarakat harus mengikutinya.

b. Partai Politik

Partai politik didefinisikan sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang mana para anggota partai politik tersebut mempunyai suatu orientasi, nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan diadakannya partai politik pada saat itu untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik.¹¹ Pendapat lain mengenai partai politik juga dikemukakan oleh Sigmund Neumann yang menyatakan bahwa partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan dan juga ideologi sosial dan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik merupakan

¹¹ Miriam Budirahardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 404

organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²

c. Partai Golongan Karya

Sejarah Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada akhir pemerintahan soekarno, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer khususnya Perwira Angkatan Darat yang menghimpun puluhan organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, serta nelayan. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Terpilih sebagai Ketua Pertama Sekber Golkar adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprpto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.

¹² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.¹³

2. Penegasan Operasional

Secara operasional penelitian dengan judul Peran Partai Golongan Karya Dalam Membangun Kesadaran Politik Masyarakat Kabupaten Tulungagung Perspektif Teori Sherman Dan Kolker ini akan menganalisis mengenai peran-peran yang dilakukan oleh partai Golongan Karya Tulungagung dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Tulungagung, partai Golongan Karya memperoleh suara terbanyak yakni sejumlah 145.206 atau 23% dari jumlah suara sah pada pemilu 2024.¹⁴

Perolehan suara yang besar tentu harus diimbangi pemberian pendidikan politik kepada masyarakat yang cukup masif. Hal tersebut tidak lepas dari upaya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai

¹³ Rizqi Josta Sanggam, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Partai Golkar Dalam Pemenangan Pilkada 2015 Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus DPD Partai Golkar Bandar Lampung)*, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018) hlm.50

¹⁴ Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Tulungagung

Golongan Karya Kabupaten Tulungagung. Upaya pendidikan yang dilakukan oleh partai Golongan Karya Kabupaten Tulungagung dalam membangun kesadaran politik tersebut akan dianalisis menggunakan teori pendidikan politik dari teori Sherman Dan Kolker. Analisis berdasarkan teori pendidikan yang dikemukakan oleh Sherman Dan Kolker terhadap pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Golongan Karya Kabupaten Tulungagung tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan perspektif fiqh siyasah.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian peran partai golongan karya dalam membangun kesadaran politik masyarakat Kabupaten Tulungagung perspektif Teori Sherman dan Kolker

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan membahas teori-teori terkait peran partai golongan karya dalam membangun kesadaran politik masyarakat Kabupaten Tulungagung perspektif Teori Sherman dan Kolker

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari metode penelitian dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Paparan Data, pada bab ini berisi tentang gambaran umum dan juga data-data terkait peran partai golongan karya dalam membangun kesadaran politik masyarakat Kabupaten Tulungagung perspektif Teori Sherman dan Kolker

Bab V Hasil Pembahasan, pada bab ini akan dipaparkan data-data yang diperoleh penulis yang berkaitan dengan peran partai Golongan Karya di Kabupaten Tulungagung dalam membangun kesadaran politik di masyarakat. Data-data tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan teori pendidikan politik dari Sherman dan Kolker yang sudah disusun oleh penulis yang kemudian pada bab ini akan menghasilkan jawaban atas rumusan masalah yang telah penulis rumuskan.

Bab VI Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan peran partai golongan karya dalam membangun kesadaran politik masyarakat Kabupaten Tulungagung perspektif Teori Sherman dan Kolker. Kemudian juga mencangkup saran yang diberikan oleh penulis terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.